

# MEWASPADAI DAN MENYIKAPI GLOBALISASI

Wahyono S.K

Pada akhir tahun 1970-an ada dua fenomena yang menonjol, yaitu pertama, adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau semua titik di muka bumi, yang kedua, adanya kejenuhan ekonomi dalam negeri Negara-negara besar sehingga membutuhkan ekspansi ke pasar dunia.

Fenomena pertama telah membuat dunia seperti tanpa jarak dan menjadi lebih terbuka sehingga terjadi globalisasi informasi. Sedangkan fenomena kedua dengan dukungan infrastuktur transportasi laut global telah menggerakkan ekonomi Negara-negara besar yang terbatas ruang geraknya di dalam negeri untuk menyerbu pasar dunia dengan memaksakan adanya pasar bebas dan perdagangan bebas, sehingga akhirnya terjadi globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi adalah rekayasa Negara-negara besar untuk *survive* dengan menguras kekayaan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga negara-negara besar menjadi semakin kaya dan negara-negara yang sedang berkembang menjadi semakin miskin.

## Beberapa Fakta Kepustakaan

1. John Pilger, *The New Rulers of the World*, 2002:

*"In November 1967 - The Time Life Corporation sponsored an extraordinary conference in Geneva which, in the course of three days,*

*designed the corporate takeover of Indonesia"*. (hal 37)

Di pihak *corporate* terdapat nama Dafis Rockefeller dengan beberapa perusahaan minyak dan bank besar, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, Siemens, Goodyear, US Steel.

Di pihak Indonesia yang hadir mewakili Presiden Soeharto adalah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Emil Salim dan kelompok ekonomi yang kelak terkenal dengan sebutan Berkeley Mafia. Orde Baru

---

\*) Wahyono S.K., Ph.D., Pemimpin Umum Majalah Telestra Lembannas Jakarta.

sejak awal pemerintahannya telah menggadaikan Indonesia kepada konglomerat dunia.

2. John Perkins, *Confession of an Economic Hit Man*, 2004:

John Perkins adalah seorang konsultan ekonomi pada perusahaan MAIN yang bekerja untuk CIA. Pada tahun 1971 John Perkins ditugaskan ke Indonesia untuk menawarkan proyek infrastruktur dan sekaligus menyediakan pinjaman modal yang sangat besar.

*"We build a global empire – loan to develop infrastuctur – most of the many never leaves the United State, it is simply transferred from banking offices in Washington to engineering offices in New York, Houston or San Francisco – the loan are so large that the debtor is forced to default on its payments after a few years – then like the Mafia we demand our pound of flesh".* (hal. xvii).

Itulah sebabnya mengapa selama Orde Baru Pemerintah Indonesia terlihat jinak dalam percaturan internasional tidak lain karena berada dalam cengkeraman negara-negara besar dan dibelit hutang yang sangat besar.

3. George Soros, *Open Society*, 2000:

*"We liven in global economy that is characterized not only by free*

*trade in goods and services but even more by the free movement of capital".* (hal. 167).

Menurut Soros dunia sekarang terbagi atas negara-negara kaya yang tergabung dalam G-7 dan berperan sebagai negara-negara miskin yang disebut negara-negara pinggir (periphery states).

*"The center is the provider of capital, the periphery is the user of capital. The center's most important feature is that it controls its own economic policies and hold in its hands the economic destinies of periphery countries".* (hal. 173).

4. Noreena Hertz, *The Silent Takeover*, 2001:

*"Over the last two decades the balance of power between politics and commerce has shifted radically, leaving politicians increasingly subordinate to the colosa economic power of big business. The political state has become the corporate state"* (hal. 11).

Nreena Hertz menulis tentang pengambil alihan secara diam-diam kekuasaan atas negara oleh perusahaan-perusahaan besar dari tangan para politisi dan selanjutnya memerintah dunia sesuai kepentingannya.

5. Joseph E. Stiglitz, *Globalization and is Discontents*, 2002.

Menurut Stiglitz pada tahun 1996 ada pertemuan penting

antara World Bank, IMF dan US Treasury, mereka membahas kebijakan pokok apa yang harus dijalankan untuk menguasai pasar dunia. Hasil pertemuan itu dikenal sebagai *The Washington Consensus*, yang intinya agar pinjaman yang diberikan kepada negara-negara sedang berkembang harus diikuti dengan *economic structural adjustment* yang merupakan *economic deregulation* atau *liberalization* melalui tindakan-tindakan *macrostability*, *privatization* dan *market and trade liberalization*.

Kebijakan ini dicoba di Meksiko, Argentina dan Indonesia. Semuanya gagal, bahkan memperparah krisis.

### Dampak Umum Globalisasi

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, globalisasi yang direkayasa negara-negara besar untuk kepentingan ekonomi mereka, mempunyai dampak yang besar, baik dalam bidang ekonomi, maupun bidang politik, sosial-budaya dan militer. Globalisasi itu setelah krisis moneter tahun 1997, datang bagaikan air bah yang tidak terbendung karena semua pertahanan sudah jebol. (lihat diagram 1).

Kemajuan di bidang teknologi di satu sisi ikut dinikmati negara-negara yang sedang berkembang, tetapi di sisi yang lain negara-negara yang sedang

berkembang itu harus membayar mahal untuk mendapatkan teknologi yang diperlukan untuk industri, sehingga menjadi tergantung kepada negara-negara besar. Sementara itu serbuan informasi telah merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya negara-negara yang sedang berkembang yang dipaksa untuk meniru nilai-nilai berat atau westernisasi.

Dalam bidang ideologi dihembuskan angin individualisme dan neoliberalisme yang mengutamakan kebebasan individu dari pada kepentingan bersama atau kepentingan negara. Neo-liberalisme tidak mengakui batas-batas negara karena yang menjadi batas adalah jangkauan bisnis perusahaan-perusahaan besar (lihat Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, 1990), bahkan mereka kemudian menggap *nation state* juga sudah tidak ada. (lihat Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State*, 1995).

Dalam bidang politik di satu sisi dilancarkan gerakan demokratisasi baik melalui cara-cara damai dengan cara menyelenggarakan reformasi politik dan pemilihan umum yang terbuka seperti di Indonesia, tetapi tidak tertutup kemungkinan dengan cara agresi militer seperti yang terjadi di Afganistan dan Irak. Di samping itu juga dilancarkan usaha-usaha untuk menguasai

Negara-negara yang sedang berkembang secara politik dan ekonomi dalam bentuk neoimperialisme atau penjajahan terselektif.

Dalam bidang ekonomi yang menonjol adalah lahirnya neokapitalisme dengan ciri utama pergerakan modal uang secara bebas tanpa hambatan batas negara dengan memaksakan pasar bebas dan perdagangan bebas. Penanaman modal di negara-negara yang sedang berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat langsung ditarik pulang. Tanpa disadari telah terjadi penyedotan kekayaan Negara-negara yang sedang berkembang oleh Negara-negara besar. Negara-negara yang sedang berkembang akhirnya dibuat tergantung kepada Negara-negara besar, baik modal, teknologi maupun pasar ekspor.

Dalam bidang sosial budaya berkembang gaya hidup kosmopolitan dan westernisasi yang tumbuh subur karena dorongan individualisme dan neo-liberalisme. Rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, rasa kebersamaan, semakin terkikis.

Di bidang militer negara-negara besar memperluas mandala operasinya keluar batas wilayah nasional dan tanggung jawab keamanan dunia di tangan mereka, sehingga mereka memiliki akses untuk beroperasi

di dalam wilayah negara-negara yang sedang berkembang, karena dianggap tidak memiliki personel dan peralatan yang cukup untuk melindungi kepentingan negara-negara besar di wilayah itu. Negara-negara besar telah menjadikan seluruh dunia sebagai mandala operasi militer mereka.

### **Ancaman Terhadap NKRI**

Beberapa tahun sebelum krisis moneter tahun 1997, beberapa lembaga swadaya asing telah mulai beraksi di Indonesia. Mereka mengusung slogan demokratisasi dan penegakkan hak azasi manusia, tetapi sesungguhnya mereka berkonspirasi untuk menumbangkan Orde Baru dan menguasai Indonesia dari dalam (lihat diagram 2).

Krisis moneter adalah momentum yang digunakan untuk melancarkan serbuan dalam banyak front sekaligus. Likuidasi bank-bank yang kehabisan modal, rontoknya saham-saham dipasar bursa, devaluasi rupiah yang langsung anjlok dari posisi 2.000 per dollar ke posisi 15.000 per dollar, penutupan pabrik-pabrik karena tidak dapat bersaing di pasar ekspor dan tidak dapat mengembalikan kreditnya, unjuk rasa kaum buruh yang menuntut kenaikan upah dan pesangon PHK, semuanya menumpuk sehingga ekonomi Indo-

nesia hancur.

Sasaran berikutnya adalah TNI yang menjadi tulang punggung NKRI sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dimulai dengan melemahkan aparat intelijen dengan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM berat, kemudian menyudutkan TNI untuk kembali ke tangsi, melepas dwifungsi, membubarkan bisnis TNI, menarik kembali anggota-anggota TNI yang dikaryakan, memisahkan TNI dan POLRI, TNI hanya urusan pertahanan dan POLRI semua urusan keamanan. Mahasiswa, pelajar dan anak-anak dikerahkan untuk demo di mana-mana menghujat TNI. Ketika TNI terpojokkan, maka muncullah suara-suara yang menuntut reformasi ideology, system politik dan system pemerintahan, juga tuntutan federalisme dan separatisme.

Ketika keran untuk mendirikan partai politik dibuka sesuai tuntutan demokratisasi, maka dalam waktu singkat lahir lebih dari 200 partai politik baru. Kehadiran paratai-partai politik yang baru itu tanpa ideologi yang jelas, justru melemahkan kekuatan politik Indonesia karena mengarah kepada anarki dan premanisme. Menghadapi pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang, yang terjadi bukannya kristalisasi, tetapi justru penambahan jumlah partai poli-

tik baru yang mendekati 30. Agaknya masih dibutuhkan waktu yang lama bagi Indonesia untuk memiliki stabilitas politik.

Pelaksanaan otonomi daerah tingkat II yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat, bukannya akan memperkuat demokratisasi, tetapi justru mengarah kepada federalisme atau bahkan separatisme yang membahayakan eksistensi NKRI. Semangat kedaerahan tumbuh subur di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, tanpa ada semangat kebersamaan dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya alam.

Unsur-unsur konflik antar kelompok di daerah juga mulai bangkit, sehingga konflik komunalpun tidak dapat dicegah, terutama di daerah-daerah yang perbedaan etnis dan agamanya mudah disulut. Adanya campur tangan dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri, menjadikan konflik komunal itu sulit diselesaikan, meskipun sudah banyak jatuh korban jiwa dan harta.

Ketika Orde Baru telah dapat ditumbangkan dan TNI dibuat tidak berdaya, sedangkan unsure-unsur kekuatan yang lain sudah tiarap, maka dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam waktu dua tahun mengalami empat kali amandemen dan menjelma menjadi Undang-Undang Dasar

2002. Kedua konstitusi itu tetap mengusung system presidential tetapi kekuasaan legislatif melebihi kekuasaan eksekutif. Tidak ada lagi wadah di mana semua unsur kekuatan nasional dapat bertemu dan berdialog serta bersama-sama menentukan haluan negara untuk waktu lima tahun ke depan. Dengan konstitusi yang baru semua berjalan sendiri-sendiri, yang mengarah kepada anarkisme dan premanisme daripada ke budaya demokrasi. Bahkan rakyat tidak ada yang mewakili karena kekuasaan di tangan partai politik.

Apabila kekuatan ekonomi sudah dapat dihancurkan, kekuatan tentara dipatahkan dan kekuatan politik diporak porandakan, maka dengan mudah Negara itu akan dapat dikuasai dari dalam oleh kekuatan asing yang besar, tanpa harus mengecewakan kekuatan militernya. Itulah yang disebut *acquisition from within*, tanpa kekerasan tanpa pertumpahan darah. Menang tanpa perang.

Demikianlah skenario neo-imperialisme untuk menguasai negara-negara yang sedang berkembang yang punya potensi besar. Globalisasi menjadi kendaraan yang ideal untuk mewujudkan scenario neo-imperialisme.

## Strategi Menghadapi Globalisasi

Menolak globalisasi ekonomi berarti menentang keinginan negara-negara besar, sehingga kita akan langsung berhadapan dengan G-7 dan perusahaan-perusahaan global pendukungnya. Termasuk World Bank, IMF, ADB dan WTO. Di sini kita harus cerdas, kita harus berpikir dan bertindak mengikuti prinsip-prinsip transformasi kekuatan, yaitu bagaimana mengubah kekuatan lawan yang masuk menjadi kekuatan kita sendiri dan mengembalikan ke asalnya sebagai pukulan balasan.

Prinsip seperti itu banyak digunakan dalam seni bela diri, seperti, *judo* dan *taekwondo*, yaitu bagaimana lawan kita jatuhkan dengan kekuatannya sendiri. Dengan sendirinya diperlukan kejelian, kecerdikan dan keberanian untuk melakukannya, serta pelatihan yang tidak kenal lelah.

Diperlukan strategi penanggulangan dan sekaligus pemanfaatan globalisasi yang komprehensif dan integral. Semua itu dapat dilakukan apabila seluruh kekuatan Indonesia bersatu, pemerintah dan masyarakatnya. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945.

Sebelum merumuskan strategi penanggulangan dan pemanfaatan globalisasi perlu ada persiapan di bidang-bidang yang pokok seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer.

Dalam bidang ideologi harus mulai digencarkan kembali dialog dan diskusi terbuka tentang keunggulan Pancasila di hadapan ideologi-ideologi yang lain dan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final. Oleh karena itu Pancasila harus tetap menjadi falsafah dasar negara dan *way of life* bangsa Indonesia.

Dalam bidang politik perlu dikaji ulang sistem politik yang ingin kita wujudkan, melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung, yaitu sistem pemerintahan presidential yang kuat yang didampingi legislatif dan yudikatif yang seimbang dan proporsional. Sistem kepartaian juga perlu diterbitkan baik jumlah maupun ideologi yang diusung tiap-tiap partai politik.

Dalam bidang ekonomi perlu dimantapkan sistem ekonomi yang mampu mewujudkan bangsa Indonesia sebagai tuan di rumah sendiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha seluas-luasnya. Separuh lebih dari kue ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dari pribumi, sedangkan yang

separuh lagi bisa di tangan asing dan non-pribumi. Kebijakan yang berbau diskriminasi ini, apa boleh buat, diperlukan untuk keselamatan bangsa Indonesia di masa datang agar tidak terulang kerusuhan berdarah tahun 1998 yang membakar Jakarta dan kota-kota besar lain.

Penelitian yang dilakukan Amy Chua, *World on Fire*, 2003, di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, menyimpulkan bahwa kerusuhan-kerusuhan berdarah yang terjadi setelah dilakukan demokratisasi ekonomi terdapat di negara-negara yang ekonominya dikuasai oleh kelompok-kelompok etnis minoritas tertentu yang disebut *market-dominant minorities*: "*When free market democracy is pursued in the presence of a market dominant minority, the almost invariable result is a backlash against democracy by forces favorable to the market-dominant minority. The third is violence, sometimes genocidal, directed against the market-dominant minority itself*". (hal 10).

Dalam bidang sosial-budaya perlu dibangkitkan kembali rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Upaya-upaya *character and nation building* dan *national integration* harus digiatkan kembali. Bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang berbudaya tinggi harus ditanamkan pada generasi muda

sejak sekolah dasar. Gerakan ini harus mendapat dukungan media massa dan seluruh masyarakat, sebagai sebuah gerakan masyarakat tanpa indoktrinasi, tetapi *learning by doing* dan kegiatan-kegiatan bersama yang bersifat gotong royong.

Dalam bidang *militer* perlu dilaksanakan wajib militer bagi semua pemuda laki-laki dan perempuan yang berusia 18 tahun selama dua tahun, yang akan menjadi YNI benar-benar tentara rakyat. Di samping itu setiap warganegara akan merasakan bahwa bangsa dan negara Indonesia itu benar-benar ada dan nyata, yaitu dengan menugaskan mereka untuk menjaga dae-

rah perbatasan dan diterjunkan dalam penanggulangan bencana alam. Tujuan wajib militer selain untuk memberikan kemampuan kemiliteran dan menanamkan rasa tanggung jawab atas keselamatan bangsa dan Negara, juga untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdisiplin dan beretos kerja yang tinggi. Wajib militer akan menjadi TNI sebagai almamater bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia akan merasa memiliki TNI, yang dibanggakan dan disayangi.

Demikian beberapa pokok pikiran untuk menyusun strategi penanggulangan dan sekaligus pemanfaatan globalisasi.

Diagram 1

### ANCAMAN GLOBALISASI

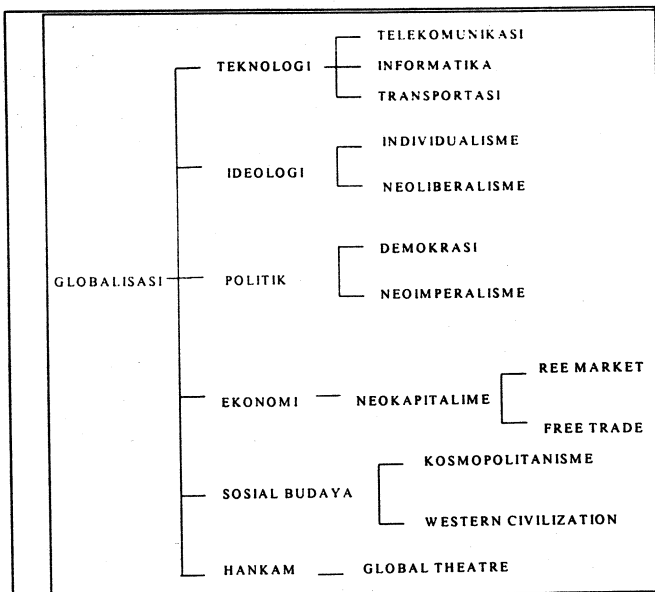




Diagram 2

